



Gudang Bawaslu Kota Jogja Overload Sampah APK

Belum Termasuk saat Hari Tenang, Akan Dialihkan ke Gudang Satpol PP

JOGJA - Mendekati hari tenang, gudang Bawaslu Kota Jogja sudah mengalami kelebihan kapasitas untuk menyimpan alat peraga kampanye (APK) yang pemasangannya melanggar. APK hasil penertiban itu meliputi baliho dan sejumlah baner.

Satpol PP menjadi salah satu pihak yang berperan membantu penertiban APK di Kota Jogja. Dalam melakukan penertiban APK ini, pihaknya menunggu arahan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tentu fungsi kami sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 75 yaitu melaksanakan dan memfasilitasi rekomendasi Bawaslu saat APK dinilai melanggar aturan," ujar Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto kepada *Radar Jogja* kemarin (9/2).

Walaupun begitu, banyak laporan dari masyarakat yang masuk langsung lewat Satpol PP perihal APK atau atribut parpol yang mengganggu lalu lintas. Laporan itu oleh Satpol PP kemudian diteruskan ke Bawaslu.

Dodi menambahkan, menurut informasi, posisi gudang Bawaslu Kota Jogja saat ini sudah penuh dengan APK hasil penertiban. Padahal proses pembersihan

total APK di hari tenang masih dilaksanakan pada Minggu (11/2).

"Posisi saat ini gudang Bawaslu sudah penuh, kemarin terakhir penertiban itu APK yang dicopot sampai disimpan di Kantor Bawaslu karena gudang penuh," tandasnya. Mengantisipasi hal itu, Bawaslu telah berkoordinasi dengan Satpol PP bahwa penertiban total APK di masa tenang akan menggunakan gudang Satpol PP. Gudang Satpol PP dipinjam untuk men-



Dodi Kurnianto
DOK. PIRADA

aruh APK yang akan diterbitkan besok hari Minggu.

"KPU dan Bawaslu meminta bantuan untuk menempatkan APK hasil penertiban di gudang Satpol PP yang ada di Rejowinangun. Kami *monggo-monggo* saja kalau memang kondisi gudang Bawaslu sudah penuh, bisa didrop ke gudang Satpol PP Kota Jogja," tambahnya.

Dalam proses skema penertiban pelanggaran pemasangan APK selama ini, Bawaslu dinilai bertindak dengan cepat jika ada personel Satpol PP yang memberikan laporan aduan masyarakat. Selama ini Bawaslu relatif cepat dalam menanggapi dan segera menghubungi kepada penanggung jawab APK parpol bersangkutan.

"Ada aduan masyarakat kemudian kami foto dan berikan lokasinya, lalu kami teruskan ke Bawaslu tingkat Kota maupun kementren," jelasnya.

Menurut Dodi, titik yang paling banyak ditemukan pelanggaran APK adalah di wilayah Kementren Umbulharjo dan Gondokusuman. Karena banyak jalan strategis dan padat, maka wilayah tersebut banyak dipasang APK.

Saat ditanya mengenai proses pengolahan limbah penertiban APK itu, Satpol PP sepenuhnya mengikuti kebijakan dari Bawaslu, karna hal itu merupakan kewenangan Bawaslu.

"Karena itu kebijakan dari Bawaslu, jadi kita nanti mengikuti saja," terangnya. **(oso/laz/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005